

Dampak Sosial Ekonomi Pariwisata di Pulau Saronde oleh PT. Blue Bay Divers

The Socio-Economic Impact of Tourism on Saronde Island by PT. Blue Divers

Rivaldi Unti^{*1)}, Rauf A. Hatu¹⁾, Dewinta Rizky R. Hatu¹⁾

¹⁾Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: ifalunti@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the socio-economic impacts of tourism on Saronde Island after its management was taken over by PT. Blue Bay Divers, focusing on the community of Ponelo Village, North Gorontalo Regency. The research is based on the decreasing participation of local residents in tourism activities following privatization. The study employs a qualitative descriptive method using field studies through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the presence of PT. Blue Bay Divers has significantly affected the social and economic dynamics of the local community. Economically, local workforce involvement decreased by up to 90%, and only two small businesses remain from the original fifteen. Socially, there has been a decline in social cohesion and a widening gap between groups involved in tourism and those excluded. The community has lost access and participation opportunities, resulting in social alienation and new economic dependency on tourism. The study concludes that the development of tourism on Saronde Island remains exclusive and has not provided equitable benefits to local residents. Inclusive policies and human resource empowerment are needed to ensure that tourism becomes a vehicle for social solidarity and economic independence in Ponelo Village.

Keywords: socio-economic impact, tourism, Saronde Island

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi pariwisata Pulau Saronde setelah dikelola oleh PT. Blue Bay Divers terhadap masyarakat Desa Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena berkurangnya peran serta masyarakat lokal dalam aktivitas pariwisata setelah pengelolaan beralih ke pihak swasta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran PT. Blue Bay Divers membawa perubahan signifikan terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Dari sisi ekonomi, keterlibatan tenaga kerja lokal menurun hingga 90%, dan jumlah usaha kecil yang bertahan hanya dua unit dari sebelumnya lima belas. Dari sisi sosial, terjadi penurunan kohesi sosial serta munculnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang masih terlibat dengan yang tersingkir dari sektor wisata. Masyarakat merasa kehilangan akses dan ruang partisipasi, yang berdampak pada munculnya alienasi sosial dan ketergantungan ekonomi baru terhadap sektor pariwisata. Kesimpulannya, pembangunan wisata Pulau Saronde masih bersifat eksklusif dan belum memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan pemberdayaan sumber daya manusia agar pariwisata dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan dan solidaritas sosial masyarakat Ponelo.

Kata kunci: dampak sosial ekonomi, pariwisata, Pulau Saronde.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata juga menjadi sumber penciptaan lapangan kerja serta sarana pelestarian budaya. Data dari World Travel and Tourism Council (WTTC, 2023) menunjukkan

Copyright © 2025 The Author(s).



Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat published by [Department of Sociology, Gorontalo State University](#), Indonesia

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

bahwa sektor pariwisata menyumbang sekitar 6,2% terhadap Produk Domestik Bruto (*PDB*) Indonesia dan menyerap jutaan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan budaya unik (Silalahi & Agustina, 2024; Siregar *et al.*, 2024).

Menurut Kustiwa & Mokodompit (2025) Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, mulai dari pegunungan, hutan tropis, hingga pulau-pulau kecil yang memiliki keindahan ekosistem laut. Sektor pariwisata bahari menjadi salah satu andalan yang menarik wisatawan domestik maupun internasional. Keberadaan pulau-pulau yang indah, terumbu karang yang masih terjaga, dan budaya lokal yang kaya memberikan peluang besar untuk pengembangan ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan citra pariwisata Indonesia di tingkat global (Fachry, 2021; Mazaya *et al.*, 2020).

Provinsi Gorontalo, sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki garis pantai panjang, memiliki potensi wisata bahari yang cukup tinggi (Paludai *et al.*, 2025). Salah satu destinasi unggulan adalah Pulau Saronde di Kabupaten Gorontalo Utara. Pulau ini terkenal dengan keindahan pantainya yang berpasir putih, kejernihan air laut, keanekaragaman biota laut, dan potensi wisata selam (*scuba diving*) yang menarik perhatian wisatawan mancanegara. Pulau Saronde juga menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal, karena masyarakat sekitar memanfaatkan pulau sebagai sarana penyedia jasa wisata, kuliner, dan transportasi. Sebelumnya, pengelolaan Pulau Saronde dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat lokal secara langsung.

Model pengelolaan ini bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, di mana warga memiliki ruang untuk mengambil keputusan, ikut menjaga lingkungan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata. Sistem ini mencerminkan prinsip *community-based tourism*, yang menekankan pemberdayaan masyarakat lokal dan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Sejak pengelolaan Pulau Saronde dialihkan ke pihak swasta, yaitu PT. Blue Bay Divers, muncul dinamika sosial dan ekonomi yang cukup signifikan di masyarakat Desa Ponelo. Peralihan ini mengakibatkan adanya pembatasan akses masyarakat terhadap pulau, berkurangnya kesempatan mereka dalam kegiatan ekonomi pariwisata, dan munculnya ketergantungan ekonomi baru pada perusahaan swasta. Dampak sosial yang muncul meliputi marginalisasi warga lokal, ketimpangan ekonomi, serta melemahnya solidaritas sosial yang sebelumnya menjadi kekuatan komunitas.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Fajar Raditya *et al.*, (2024) dan Atiki *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata yang tidak inklusif berpotensi menimbulkan ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak investor atau pengelola swasta dibandingkan masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan masalah sosial, seperti alienasi masyarakat terhadap sumber daya yang sebelumnya mereka kuasai, penurunan rasa memiliki, dan berkurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pergeseran dari pengelolaan berbasis komunitas ke pengelolaan komersial berdampak pada struktur ekonomi lokal. Banyak usaha kecil yang sebelumnya berkembang di sekitar Pulau Saronde mengalami penurunan bahkan terpaksa tutup, karena akses terbatas dan persaingan dengan perusahaan. Lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat lokal juga menurun, sehingga sebagian warga menghadapi kesulitan ekonomi yang baru. Hal ini menunjukkan adanya transformasi sosial-ekonomi yang signifikan akibat perubahan sistem pengelolaan pariwisata. Penelitian sebelumnya banyak menekankan dampak positif pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, keterampilan, dan kesempatan kerja (Anggoro *et al.*, 2023; Kusuma Hardi *et al.*, 2023; Tangahu *et al.*, 2025). Namun, studi-studi tersebut belum banyak menyoroti kasus di mana pengelolaan pariwisata beralih ke pihak swasta, yang berakibat pada berkurangnya peran serta masyarakat lokal, hilangnya akses ekonomi, dan munculnya ketimpangan sosial.

Studi ini memiliki keunikan karena menyoroti fenomena alienasi sosial dan eksploitasi ekonomi di tingkat lokal akibat pengelolaan oleh perusahaan asing, dengan fokus pada Pulau Saronde sebagai studi kasus. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori perubahan

sosial Karl Marx dan Talcott Parsons. Karl Marx menekankan bahwa perubahan struktur ekonomi dan kepemilikan alat produksi akan memengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat (Halawa & Listyorini, 2025). Dalam konteks Pulau Saronde, peralihan pengelolaan dari masyarakat lokal ke pihak swasta menimbulkan ketimpangan sosial, marginalisasi warga, dan bentuk *alienation*, karena masyarakat kehilangan kontrol terhadap sumber daya ekonomi yang sebelumnya menopang kehidupan mereka. Sementara itu, Talcott Parsons menawarkan perspektif yang menekankan proses adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Menurut Parsons, ketidakseimbangan sosial (*social disequilibrium*) muncul ketika struktur nilai, norma, dan pola interaksi lama tidak lagi sesuai dengan sistem baru. Agar tercipta keseimbangan sosial baru, masyarakat perlu melalui proses adaptasi dan integrasi, termasuk melalui pemberdayaan dan pelibatan aktif dalam pengelolaan pariwisata (Sawyer & Gampa, 2020).

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik pengelolaan yang eksklusif dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat lokal. Tidak hanya mengurangi pendapatan, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, kohesi komunitas, dan keberlanjutan budaya lokal. Studi ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial-ekonomi pariwisata dan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan pengelolaan yang lebih inklusif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penguatan nilai-nilai sosial. Pendekatan *sustainable tourism* dapat menjadi strategi untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan masyarakat lokal sehingga tercipta manfaat yang adil dan merata. Konsep pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam konteks pengelolaan Pulau Saronde. Pemberdayaan ini meliputi peningkatan kapasitas warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan ekonomi berbasis pariwisata, serta pembentukan mekanisme kemitraan yang setara antara perusahaan dan masyarakat lokal. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat secara pasif, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam pengembangan wisata dan pengelolaan sumber daya lokal (Hasan & Hatibie, 2021).

Pulau Saronde sebagai destinasi wisata juga menjadi ruang interaksi sosial yang kompleks, di mana faktor ekonomi, budaya, dan sosial saling terkait. Kehadiran pihak swasta mengubah pola interaksi ini, karena struktur pengelolaan yang baru lebih berorientasi pada profit daripada partisipasi sosial. Hal ini menuntut masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru, menghadapi tantangan ekonomi, dan merespons perubahan sosial yang muncul (Syamsu *et al.*, 2024). Selain aspek ekonomi dan sosial, perubahan pengelolaan juga berdampak pada aspek lingkungan. Model pengelolaan berbasis komunitas sebelumnya menekankan pelestarian ekosistem laut dan pantai melalui kegiatan gotong royong dan pemantauan lokal.

Masuknya perusahaan swasta mengubah fokus pengelolaan menjadi lebih pada aspek komersial, yang berpotensi mengabaikan partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Dengan pendekatan yang holistik, pengelolaan wisata tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan Pulau Saronde.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana dampak sosial ekonomi pengelolaan pariwisata Pulau Saronde oleh PT. Blue Bay Divers terhadap masyarakat Desa Ponelo? Tujuannya adalah menganalisis dan mendeskripsikan dampak sosial ekonomi tersebut, baik dalam aspek kesejahteraan ekonomi maupun perubahan sosial masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis, dengan memperluas kajian mengenai dampak sosial ekonomi pariwisata dalam konteks pengelolaan oleh pihak swasta, dan kontribusi praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pengelola wisata dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Studi ini bertujuan menekankan bahwa pariwisata bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga fenomena sosial yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Dengan

pemahaman ini, strategi pengembangan pariwisata dapat diarahkan untuk memperkuat hubungan sosial, meningkatkan solidaritas komunitas, dan menjaga identitas budaya lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai dampak sosial ekonomi pariwisata Pulau Saronde setelah dikelola oleh PT. Blue Bay Divers terhadap kehidupan masyarakat Desa Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Bogdan, R. C., & Taylor (dalam Moleong, 2019), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji menuntut pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial yang dialami masyarakat lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara utuh fenomena sosial-ekonomi yang muncul akibat perubahan sistem pengelolaan pariwisata. Menurut Cresweel (2018) penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok sebagai hasil dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk mengkaji perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami masyarakat Desa Ponelo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan PT. Blue Bay Divers

Desa Ponelo terletak di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, dan merupakan wilayah pesisir dengan potensi besar di bidang wisata bahari. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan petani kelapa yang bergantung pada sumber daya laut. Pulau Saronde, yang termasuk dalam wilayah administratif Desa Ponelo, memiliki nilai penting sebagai kawasan wisata sekaligus ruang sosial masyarakat. Sebelum dikelola oleh pihak swasta, Pulau Saronde berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dengan sistem yang masih sederhana dan melibatkan masyarakat lokal. Sejak tahun 2007, pengelolaan difokuskan pada kebersihan dan pelestarian lingkungan melalui kegiatan gotong royong. Seorang individu menjadi pionir dalam menjaga keberlangsungan wisata dan kemudian diangkat secara resmi oleh pemerintah pada tahun 2008. Upaya tersebut turut mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem dan mendukung perkembangan wisata di wilayah tersebut.

Masyarakat Desa Ponelo memiliki struktur sosial yang erat, di mana hubungan antarwarga dibangun melalui tradisi gotong royong dan berbagai kegiatan komunitas rutin. Keterikatan sosial ini terlihat dalam aktivitas pemeliharaan lingkungan pesisir, pembangunan fasilitas wisata sederhana, serta pengelolaan sumber daya laut secara bersama-sama. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap Pulau Saronde sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Selain aspek sosial, ekonomi lokal Desa Ponelo sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mayoritas warga bekerja sebagai nelayan, petani kelapa, atau penyedia jasa pariwisata kecil seperti penyewaan perahu, homestay, dan warung makanan. Pulau Saronde sebagai destinasi wisata membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas jaringan sosial, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Model pengelolaan berbasis komunitas ini memungkinkan manfaat ekonomi tersebar secara merata dan menjaga kontrol masyarakat terhadap aset lokal, yang menjadi penopang utama kehidupan sehari-hari mereka.

Informan YK, pengelola pariwisata Desa Ponelo, diwawancara di Pulau Saronde pada 12 Maret 2024, menyatakan:

“Sejak tahun 2007, saya telah menetap dan bekerja di Pulau Saronde ketika pengelolaannya masih berada langsung di bawah Pemerintah Daerah (PEMDA) Gorontalo Utara tanpa keterlibatan pihak ketiga. Saya juga menjadi orang pertama yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan wisata. Awalnya saya bekerja tanpa Surat Keputusan (SK) hingga akhirnya pada tahun 2008 mendapatkan SK resmi setelah setahun penuh mengabdikan. Selama periode awal pengelolaan, pekerjaan saya berfokus pada perawatan dan pelestarian lingkungan pulau, seperti membersihkan kawasan setiap hari, menanam pohon, serta menjaga kelestarian pulau. Pada tahun 2013, ketika PT. Gorontalo Alam Bahari (GAB) mulai masuk, saya tetap bertahan dan hidup berdampingan dengan aktivitas wisata yang ada.”

Ungkapan Bapak YK menunjukkan bahwa sejak awal pengelolaan Pulau Saronde, masyarakat lokal memainkan peran sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata. Tindakan sukarela yang dilakukannya tidak hanya mencerminkan rasa tanggung jawab pribadi, tetapi juga memperlihatkan kepemilikan kolektif masyarakat terhadap sumber daya alam setempat. Semangat gotong royong yang diterapkan dalam pelestarian lingkungan, seperti membersihkan kawasan pantai setiap hari, menanam pohon, dan memelihara ekosistem laut, menjadi fondasi utama bagi praktik *community-based management* yang berkelanjutan. Model pengelolaan ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian pulau sambil mendukung perkembangan ekonomi lokal melalui pariwisata.

Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2013, masuknya PT. Gorontalo Alam Bahari (GAB) mulai menggeser pola pengelolaan yang sebelumnya partisipatif menjadi lebih terpusat dan berorientasi komersial. Pergeseran ini membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Menurut teori perubahan sosial Karl Marx, setiap perubahan dalam struktur ekonomi dan kepemilikan alat produksi akan memengaruhi hubungan sosial dan dinamika masyarakat. Dalam konteks Pulau Saronde, dominasi PT. GAB mencerminkan transformasi ekonomi dari sistem komunitas yang inklusif menjadi sistem kapitalistik yang lebih terpusat, di mana keputusan strategis dan akses terhadap sumber daya dikuasai oleh pihak swasta. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya memiliki peran aktif dalam pengelolaan pariwisata mengalami penurunan partisipasi, berkurangnya peluang ekonomi, dan munculnya ketimpangan sosial baru yang memerlukan proses adaptasi agar keseimbangan sosial dapat dipulihkan.

Masuknya pihak swasta mengurangi keterlibatan masyarakat. RL, warga Desa Ponelo, di wawancara di kediamannya pada 15 April 2024,

“Dulu suasana sangat ramai, banyak masyarakat lokal yang terlibat dan tenaga mereka terpakai secara maksimal. Saat ini, jumlahnya tinggal dapat dihitung dengan jari. Prosedur perekrutan pun tidak kami ketahui, karena jika kami mengetahuinya, tentu kami sudah mempelajarinya agar bisa ikut serta.”

Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa peralihan pengelolaan Pulau Saronde kepada PT. Gorontalo Alam Bahari menimbulkan perubahan sosial yang sangat signifikan di Desa Ponelo. Dampak nyata terlihat pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pariwisata, berkurangnya peluang kerja bagi warga lokal, serta terbatasnya akses ekonomi masyarakat terhadap sumber daya wisata yang sebelumnya dapat mereka manfaatkan secara langsung. Pergeseran ini sejalan dengan teori Karl Marx, yang menekankan bahwa perubahan dalam struktur ekonomi dan penguasaan alat produksi akan memengaruhi hubungan sosial serta hierarki kekuasaan di masyarakat.

Masyarakat Desa Ponelo, yang sebelumnya memiliki peran aktif dan langsung dalam pengelolaan pariwisata, kini mengalami marginalisasi akibat dominasi pihak luar yang mengontrol proses pengambilan keputusan dan distribusi keuntungan ekonomi. Sementara itu, perspektif Talcott Parsons menunjukkan bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan sosial (*social disequilibrium*), sehingga masyarakat perlu melalui proses adaptasi untuk mencapai keseimbangan sosial baru. Penanganan ketimpangan ini membutuhkan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif,

di mana masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pengelolaan pariwisata agar mereka tidak hanya menjadi pengamat, tetapi kembali memiliki kendali, manfaat ekonomi, dan rasa kepemilikan terhadap Pulau Saronde.

Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan PT. Blue Bay Divers

Kehadiran PT. Blue Bay Divers di Pulau Saronde menandai titik penting dalam perkembangan pariwisata di wilayah tersebut. Perusahaan ini membawa perubahan signifikan terhadap pola pengelolaan yang sebelumnya dilakukan secara sederhana oleh pemerintah daerah bersama masyarakat lokal. Pergeseran pengelolaan dari sistem partisipatif berbasis komunitas menjadi pengelolaan profesional oleh pihak swasta menghasilkan berbagai tanggapan dari warga, baik yang mendukung maupun yang bersikap kritis. Sebagian masyarakat menilai kehadiran perusahaan memberikan peluang ekonomi baru, seperti tersedianya lapangan kerja tambahan, peningkatan promosi wisata daerah, serta potensi pertumbuhan usaha mikro dan jasa pendukung pariwisata. Namun, kekhawatiran juga muncul karena profesionalisasi pengelolaan berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya wisata. Banyak warga menilai orientasi investasi perusahaan lebih mengutamakan kepentingan komersial, sehingga akses dan partisipasi masyarakat menjadi terbatas. Dampak yang paling dirasakan secara nyata adalah pembatasan akses terhadap Pulau Saronde. Pulau yang sebelumnya menjadi ruang publik dan dapat digunakan masyarakat secara bebas kini hanya dapat dikunjungi melalui izin tertentu. Hal ini menimbulkan rasa keterbatasan dan kehilangan kebebasan masyarakat dalam memanfaatkan wilayah tersebut, terutama bagi nelayan yang selama ini bergantung pada pulau sebagai tempat beristirahat atau berlindung ketika cuaca buruk.

Bapak YK, seorang nelayan Desa Ponelo, diwawancara di kediamannya pada 20 Maret 2024, menyampaikan:

“Dulu, singgah di Pulau Saronde adalah hal yang biasa dan tidak ada aturan yang menyulitkan. Kami bisa datang kapan saja, entah untuk sekedar beristirahat, mencari ikan, atau membawa keluarga menikmati pantai. Sekarang semuanya berubah. Setiap kali ingin singgah harus mengurus izin terlebih dahulu. Rasanya seperti pulau itu bukan lagi milik kami, padahal sejak dulu tempat ini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar. Kadang situasi ini sangat menyulitkan, apalagi bagi kami para nelayan. Jika di tengah laut tiba-tiba datang badai atau cuaca memburuk, pilihan paling aman adalah menepi di Pulau Saronde. Dulu kami bisa langsung berlabuh tanpa ragu, tetapi sekarang serba terbatas karena aturan dari pengelola.”

“Kalau di laut tiba-tiba datang badai atau cuaca buruk, pilihan paling aman ya menepi di Pulau Saronde. Dulu bisa langsung berlabuh, sekarang serba terbatas karena aturan pengelola. Prosedur dan biaya urus izin juga terasa berat. Rasanya sedih, karena kami kehilangan rasa memiliki terhadap pulau itu. Sekarang terlihat lebih seperti tempat wisata yang dikelola ketat, bukan lagi bagian dari kehidupan sehari-hari kami.”

Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sosial di Desa Ponelo terjadi secara signifikan setelah pengelolaan Pulau Saronde dialihkan kepada PT. Blue Bay Divers. Pulau yang sebelumnya menjadi ruang publik kini berubah menjadi kawasan wisata tertutup, sehingga masyarakat kehilangan kebebasan untuk beraktivitas serta ruang partisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Menurut perspektif Karl Marx, kondisi ini muncul akibat pergeseran penguasaan ekonomi dari masyarakat lokal ke pihak swasta, yang menyebabkan ketimpangan sosial dan membuat warga merasa terasing dari lingkungan yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Pergeseran kepemilikan sumber daya ini memunculkan bentuk *alienation*, di mana masyarakat kehilangan kontrol terhadap pengelolaan ekonomi dan lingkungan setempat. Sementara itu, menurut Talcott Parsons, perubahan semacam ini menimbulkan ketidakseimbangan sosial (*social disequilibrium*), karena struktur norma, nilai, dan pola interaksi lama tidak lagi selaras dengan sistem pengelolaan baru. Untuk memulihkan

keseimbangan sosial, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif, di mana warga dilibatkan kembali secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat ekonomi pariwisata. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan solidaritas sosial, sehingga pariwisata dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan bagi Desa Ponelo.

Pembatasan Akses dan Hilangnya Partisipasi Masyarakat

Perubahan sistem pengelolaan Pulau Saronde membawa dampak signifikan terhadap pola partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata. Warga yang sebelumnya memiliki peran aktif dan dapat terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas pariwisata kini harus menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Partisipasi masyarakat menjadi bersifat formal dan sangat bergantung pada kesempatan yang diberikan oleh pihak pengelola. Kondisi ini menciptakan perbedaan pengalaman di antara warga; sebagian masih terlibat sebagai tenaga kerja musiman atau penyedia jasa transportasi, sementara yang lain memilih mundur karena merasa tidak memiliki ruang untuk berperan secara bermakna. Berkurangnya keterlibatan masyarakat secara langsung menyebabkan hilangnya rasa memiliki terhadap Pulau Saronde dan menimbulkan perasaan terpinggirkan. Hal ini diperparah karena kebijakan baru sering ditetapkan tanpa melibatkan warga lokal dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan strategis terkait pengelolaan pariwisata tidak lagi mencerminkan aspirasi atau kepentingan masyarakat setempat.

Bapak AB, aparat Desa Ponelo, diwawancara di kantor desa pada 22 Maret 2024, menyampaikan:

“Kami tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Seharusnya kami dihargai sebagai warga lokal, karena kami memiliki ikatan keluarga dan sejarah dengan pulau ini. Sekarang, hanya karena masalah pengelolaan pulau, ikatan dan hak kami terasa terganggu dan bermasalah.”

“Setelah pengelolaan dialihkan ke PT. Blue Bay Divers, warga lokal tidak lagi menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan perasaan terpinggirkan dan menunjukkan perubahan sosial struktural yang cukup signifikan di Desa Ponelo.”

Pernyataan tersebut menegaskan adanya perubahan sosial struktural yang signifikan di Desa Ponelo, khususnya dalam pola relasi antara masyarakat dan sistem pengelolaan Pulau Saronde. Setelah dialihkan kepada PT. Blue Bay Divers, warga lokal tidak lagi menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Akibatnya, muncul rasa kecewa, hilangnya pengakuan terhadap peran mereka, dan berkurangnya motivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi maupun sosial di pulau tersebut. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Karl Marx mengenai *economic structure*, yang menekankan bahwa perubahan pada struktur ekonomi, khususnya kepemilikan alat produksi, akan secara langsung memengaruhi tatanan sosial dalam masyarakat.

Pergeseran penguasaan Pulau Saronde dari masyarakat lokal ke pihak swasta asing memunculkan perubahan kelas sosial, di mana warga lokal berada pada posisi subordinat, kehilangan kontrol atas sumber daya ekonomi yang sebelumnya menopang kehidupan mereka, serta mengalami marginalisasi dalam distribusi manfaat ekonomi pariwisata. Sementara itu, perspektif Talcott Parsons menyoroti konsekuensi sosial dari pergeseran tersebut, di mana perubahan sistem pengelolaan menimbulkan ketidakseimbangan sosial (*social disequilibrium*). Struktur nilai, norma, dan pola interaksi lama tidak lagi selaras dengan sistem baru, sehingga dibutuhkan proses adaptasi agar tercipta keseimbangan sosial yang baru. Fungsi adaptasi dan integrasi menjadi penting, yaitu upaya melibatkan kembali masyarakat dalam sistem pengelolaan wisata melalui partisipasi aktif, konsultasi dalam pengambilan keputusan, dan pemberian ruang bagi warga untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap Pulau Saronde, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga pariwisata dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan dan solidaritas sosial bagi seluruh masyarakat Desa Ponelo.

Dampak Ekonomi dan Tata Kelola Pariwisata di Pulau Saronde

Kehadiran PT. Blue Bay Divers membawa dampak yang cukup kompleks terhadap perekonomian masyarakat Desa Ponelo. Sebelum pengelolaan dialihkan ke pihak swasta, sektor pariwisata menjadi salah satu sumber utama penghidupan warga, terutama melalui usaha mikro seperti warung makan, jasa transportasi laut, persewaan alat snorkeling, dan penginapan sederhana. Warga lokal memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam penyediaan layanan wisata, sehingga sebagian besar manfaat ekonomi terserap langsung oleh masyarakat. Setelah pengelolaan beralih ke PT. Blue Bay Divers, pola ekonomi lokal mengalami transformasi signifikan. Sistem pengelolaan yang bersifat top-down menempatkan seluruh pengambilan keputusan, termasuk penentuan tarif, alokasi lokasi usaha, dan prosedur operasional, sepenuhnya berada di tangan perusahaan. Akibatnya, ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi wisata berkurang drastis. Warga yang sebelumnya memiliki peran strategis kini hanya menjadi pengamat terhadap perubahan yang terjadi di wilayah mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan ketergantungan ekonomi baru, di mana warga harus menunggu kesempatan yang diberikan perusahaan untuk dapat berpartisipasi secara terbatas dalam kegiatan ekonomi di Pulau Saronde

Jumlah usaha kecil lokal yang sebelumnya lebih dari sepuluh unit kini menyusut drastis menjadi hanya dua unit yang masih beroperasi. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi dari model yang terbuka dan partisipatif menjadi sistem yang lebih eksklusif dan terpusat. Dampak ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha, yang sebelumnya mampu memperoleh penghasilan cukup stabil dari kunjungan wisatawan. AK, pemilik salah satu warung makan di sekitar Pulau Saronde, diwawancarai di warungnya pada 25 Maret 2024, menyampaikan:

“Sebelum pengelolaan PT. Blue Bay Divers, jumlah pengunjung sangat ramai, terutama pada akhir pekan. Penghasilan warung saya bisa mencapai lima ratus ribu rupiah sehari. Sekarang, akses yang lebih ketat membuat pengunjung menurun drastis. Kami harus mengurus izin terlebih dahulu dan kadang tidak diizinkan berjualan di area tertentu. Banyak teman saya yang sebelumnya memiliki usaha kecil terpaksa menutup warung mereka”.

“Berkurangnya kesempatan berjualan dan akses yang dibatasi bukan hanya soal penghasilan, tapi juga membuat warga merasa tersisih dari pulau yang sejak dulu menjadi bagian hidup mereka. Keputusan pengelolaan yang diambil tanpa melibatkan masyarakat lokal menimbulkan perasaan terpinggirkan. Kami merasa ikatan kami dengan Pulau Saronde kini terganggu, sementara aspirasi dan kepentingan warga tidak lagi diperhatikan dalam setiap kebijakan pengelolaan.”

Selain mengurangi kesempatan ekonomi, sistem pengelolaan baru juga memengaruhi dinamika distribusi pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga. Warga yang masih bertahan bekerja sebagai tenaga musiman atau penyedia jasa transportasi laut sering menghadapi pendapatan yang tidak menentu, sehingga kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam usaha baru atau mengembangkan keterampilan terbatas. Kondisi ini menciptakan ketergantungan pada kebijakan perusahaan, yang menempatkan warga dalam posisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan sebelumnya.

Dalam kerangka teori Karl Marx, fenomena ini dapat dipahami sebagai dampak perubahan struktur kepemilikan alat produksi terhadap posisi sosial-ekonomi masyarakat. Pergeseran penguasaan Pulau Saronde dari masyarakat lokal ke perusahaan swasta mengubah status warga dari pelaku ekonomi yang mandiri menjadi kelompok yang terpinggirkan, dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Talcott Parsons menekankan bahwa perubahan struktur ekonomi seperti ini akan memunculkan ketidakseimbangan sosial (*social disequilibrium*), karena sistem baru tidak memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi masyarakat lokal. Untuk mengatasi dampak tersebut, diperlukan pendekatan tata kelola pariwisata yang lebih inklusif dan partisipatif. Strategi ini dapat

mencakup pelibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan wisata, pemberian peluang usaha yang adil, pelatihan keterampilan ekonomi berbasis pariwisata, serta pembentukan mekanisme konsultasi yang rutin antara perusahaan dan warga lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat secara pasif, tetapi dapat kembali memperoleh peran strategis dalam pengelolaan pariwisata, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperkuat kohesi sosial di Desa Ponelo.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilalihan pengelolaan Pulau Saronde oleh PT. Blue Bay Divers telah secara signifikan mengubah hubungan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat lokal. Akses warga terhadap pulau menjadi terbatas, keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata menurun, dan muncul perasaan terasing akibat hilangnya peran utama dalam pengelolaan destinasi. Pergeseran dari sistem berbasis komunitas ke sistem komersial berdampak pada berkurangnya pendapatan, peluang kerja, dan keberlangsungan usaha lokal. Temuan ini mendukung teori Karl Marx mengenai dampak perubahan struktur ekonomi terhadap ketimpangan sosial dan alienasi, serta pandangan Talcott Parsons bahwa perubahan tersebut menciptakan ketidakseimbangan sosial yang memerlukan adaptasi agar tercapai keseimbangan baru. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak sosial-ekonomi dari perubahan sistem pengelolaan pariwisata, khususnya hubungan antara masyarakat lokal dan pihak swasta, dan menegaskan perlunya studi lanjutan yang melibatkan aktor sosial tambahan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat lokal, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penelitian ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terkait yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang berharga. Lebih khusus kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara yang telah bekerja sama dan mau berpartisipasi dalam memberikan informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia berbagi pengalaman dan wawasan mereka kepada kami.

DAFTAR REFERENSI

- Anggoro, Z. S. D., Dianasari, D. A. M. L., & Liestieandre, H. K. (2023). The Impact Of Tourism On The Economic, Socio-Cultural, And Environment In Osing Tourism Village Kemiren Banyuwangi. *Jurnal Kepariwisata*, 22(2), 122–132. <https://doi.org/10.52352/jpar.v22i2.884>
- Atiki, P., Hatu, R. A., & Latore, S. (2025). Dampak Sosial Objek Wisata Danau Perintis Bagi Masyarakat Sekitar Di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 194–204. <http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/article/view/254> <http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/article/download/254/59>
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1990). Introduction To Qualitative Research Methods. In *The Search For Meanings*.
- Fachry, M. E. (2021). Parawisata Bahari Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Sulawesi Selatan. *Journal Of Fisheries And Marine Science (Jfmarsci)*, 5(December), 16–28.
- Fajar Raditya, D., Ayu Made Lily Dianasari, D., Made Subrata, I., Studi Manajemen Manajemen Kepariwisata, P., Pariwisata, D., Kepariwisata, J., Pariwisata Bali Jalan Dharmawangsa, P., Dua, N., & Badung, K. (2024). Science In Tourism Destination Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat Di Desa Wisata Kenderan. *Journal Of Applied Science In Tourism Destination*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.52352/jastd.v2i1.1450>
- Halawa, K., & Listyorini, H. (2025). Provision And Development Of Tourism Amenities In The Context Of Tourist Comfort And Sustainability In Economic, Socio-Cultural And

- Environmental Identity Of Tourism Villages. *Journal Of Tourism Economics And Policy*, 5(3), 373–384. <https://doi.org/10.38142/Jtep.V5i3.1347>
- Hasan, A., & Hatibie, I. K. (2021). Pengaruh elektronik marketing terhadap minat wisatawan berkunjung ke Pulau Saronde. *Media Wisata*, 12(2). <https://doi.org/10.36276/mws.v12i2.212>
- Kustiwa, R. I., & Mokodompit, E. (2025). Pengembangan Parawisata Bahari Berbasis Blue Economy. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1347–1352.
- Kusuma Hardi, Y., Nuada, I. W., & Supriyadi, E. (2023). Exploring The Impact Of Tourism On The Community's Economy. *Advances In Tourism Studies*, 1(1), 37–42. <https://doi.org/10.47492/Ats.V1i1.11>
- Mazaya, A. F. A., Yulianda, F., & Taryono, T. (2020). Marine Ecotourism Demand (Snorkeling And Diving) And Coral Reefs Resources Valuation In Karimunjawa National Park. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(1), 26–34. <https://doi.org/10.18343/jipi.25.1.26>
- Paludai, M. S., Hatu, R. A., Latare, S., & Bumulo, S. (2025). Community Participation In The Development Of The Minanga Beach Tourism Area In Atinggola District, North Gorontalo Regency. *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 63–74.
- Sawyer, J. E., & Gampa, A. (2020). Work Alienation And Its Gravediggers: Social Class, Class Consciousness, And Activism. *Journal Of Social And Political Psychology*, 8(1), 198–219. <https://doi.org/10.5964/jsp.V8i1.1132>
- Silalahi, R. J., & Agustina, N. (2024). Analysis Of Tourism Performance In Ten Priority Tourism Destinations In Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 18(2), 197–212. <https://doi.org/10.47608/jki.V18i22024.197-21>
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. In Alfabeta.
- Syamsu, M. N., Apriliana, S. W., Amirrulloh, A., Sarbini, S., Suswanto, S., & Syaifulloh, M. (2024). Kajian Daya Tarik Wisata Dalam Pengembangan Pantai Sadranan Di Gunung Kidul Yogyakarta. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.47256/kji.V18i1.372>
- Tangahu, M. F., Ibrahim, R., & Bumulo, S. (2025). Upaya Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tombulilato , Kecamatan Atinggola , Kabupaten Gorontalo Utara
Efforts Of Village Officials To Improve The Local Economy In Tombulilato Village , Atinggola District , North Gorontalo Regency. *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 75–89.